

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KABUPATEN BANTAENG**

**NUR FATIMAH NASDA**

**E011171011**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**



**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ABSTRAK**

**NUR FATIMAH NASDA, nomor pokok E011171011 menyusun skripsi yang berjudul : “Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantaeng” dibawah bimbingan Prof. Dr. Hamsinah, M.Si dan Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos.,M.Si.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantaeng dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan informan dari aparatur pemerintah daerah dan pelaku PKL. Fokus penelitiannya adalah, penetapan standar pelaksanaan (prencanaan), pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, dan pengambilan tindakan korektif. Pengumpulan data penelitian adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Pedagang Kaki Lima belum cukup maksimal hal ini dikarenakan dari segi penentuan standar pelaksanaan walaupun telah berjalan sesuai dengan tupoksinya, akan tetapi perlu adanya peraturan baru dalam pengawasan tersebut. Adapun dari segi pengukuran pelaksanaan kegiatannya nyata belum cukup maksimal karena masih banyaknya pedagang yang melakukan pelanggaran walaupun telah dilakukan pengawasan secara langsung dan sosialisasi tentang pentingnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan dari segi pengambilan tindakan korektif dinilai masih kurang maksimal karena banyaknya kendala yang dihadapi pelaksana pengawasan dan tidak adanya sanksi tegas yang mengatur bagi PKL yang melanggar.

**Kata Kunci : Pengawasan, Pedagang Kaki Lima, Pelanggaran.**



HASANUDDIN UNIVERSITY

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### ABSTRACT

***Nur Fatimah Nasda, main number E011171011 compiled a thesis entitled : “Supervision of Street Vendors in Bantaeng District” under the guidance of Prof. Dr. Hamsinah M.Si dan Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos.,M.Si.***

*This study aims to describe and analyze the Supervision of Street Vendors in Bantaeng Regency using descriptive qualitative research methods, with informants from local government officials and street vendors. The focus of the research is setting implementation standards (planning), measuring the implementation of real activities, and taking corrective actions. Research data collection is interview, observation, and documentation.*

*The results of this study indicate that the supervision of street vendors has not been maximal enough, this is because in terms of standard setting, although it has been running in accordance with its main functions, there is a need for new regulations in the supervision. As for measuring performance, it has not been maximal enough because there are still many traders who commit violations even though direct supervision and socialization have been carried out on the importance of complying with the rules that have been set. Meanwhile, in terms of correcting deviations, it is still considered less than optimal because of the many obstacles faced by the supervisors and the absence of strict sanctions governing street vendors who violate.*

***Keywords : Supervision, Street Vendors, Violation.***



**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN**

Nama : Nur Fatimah Nasda  
Nim : E011171011  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PENGAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN BANTAENG** benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Makassar, 22 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Nur Fatimah Nasda  
NIM. E011171011



**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Nur Fatimah Nasda  
Nim : E011171011  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Pengawasan Pedagang Kaki Lima  
Di Kabupaten Bantaeng

Telah diperiksa oleh Ketua Program Studi Administrasi Publik dan Pembimbing serta dinyatakan layak untuk diajukan sidang skripsi Program Studi Adminitrasi Publik Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 22 Juni 2022

Menyetujui :

Pembimbing I

Prof. Dr. Hamsinah, M.Si  
NIP. 19551103 198702 2 001

Pembimbing II

Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P  
NIP. 19720507 200212 1 001

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,

Dr. Nurdin Nara, M.Si.  
NIP. 19630903 198903 1002





**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Nur Fatimah Nasda  
Nim : E011171011  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Pengawasan Pedagang Kaki Lima  
Di Kabupaten Bantaeng

Telah dipertahankan dihadapan sidang Penguji Skripsi Program Studi Administrasi Publik Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Senin 04 Juli 2022.

**Dewan Penguji Skripsi**

Ketua Sidang : Prof Dr. Hamsinah, M.Si

(.....)

Sekretaris Sidang : Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P

(.....)

Anggota : Prof. Dr. Moh. Thahir Haning, M.Si

(.....)

: Dr. Gita Susanti, M.Si

(.....)

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantaeng**”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangan pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat kondusif.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda tercinta **Nasruddin** dan Ibunda tercinta **Nur Ida H** yang telah tulus dan ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, dan doa, perhatian, dukungan moral dan materi yang telah diberikan selama ini. Terima kasih telah meluangkan segenap waktu dan tenaga untuk membimbing, mendidik, dan mengiringi perjalanan hidup penulis tentunya dengan doa-doa yang dipanjatkan tiada hentinya agar penulis dapat sukses dalam menggapai cita-cita. Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik di dunia ini. Penulis tidak dapat membalas semua ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc sebagai Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Armin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh stafnya.

3. Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Prof Dr. Hamsinah ,M.Si dan Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos., M.A.P selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah mendorong, membantu, membimbing serta mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Prof. Dr. H M. Thahir Haning, M.Si dan Dr. H. Gita Susanti, M.Si selaku dosen penguji dalam sidang proposal dan skripsi dan atas segala motivasi, arahan dan kritikan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk penulis selama masa perkuliahan. Semoga penulis dapat memanfaatkannya sebaik mungkin.
7. Alm. Dr. Ali Fauzy Eli, M.Si selaku pembimbing akademik yang pernah membimbing penulis selama masa perkuliahan, semoga almarhum tenang disisi-Nya.
8. Seluruh Staf Departemen Ilmu Administrasi (Ibu Rosmina, Ibu Darma, dan Pak Lili) dan staf di lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya untuk penulis selama ini.
9. Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng beserta seluruh Staf atas keramahan dan bantuannya selama penulis melaksanakan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantaeng beserta Staf atas keramahan dan bantuannya dalam memberikan informasi selama penulis melaksanakan penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Pedagang Kaki Lima yang bersedia memberikan informasi untuk melengkapi data yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. UKM Ibnu Khaldun FISIP UNHAS. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan dan pengalaman yang tidak akan penulis dapatkan di tempat lain. Semoga penulis dapat mengamalkan kebaikan-kebaikan yang didapatkan selama berorganisasi.
13. Keluarga Besar HUMANIS FISIP UNHAS yang menjadi tempat berproses dan tempat penulis mendapatkan pengalaman berorganisasi.



14. Relawan Pendidikan Indonesia. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis berproses menjadi mandiri dan lebih peduli dengan lingkungan sosial. Banyak pengalaman yang tidak bisa dilupakan penulis selama bergabung di organisasi ini.
15. Keluarga Peduli Anak Yatim dan Fakir Miskin yang menjadi wadah bagi penulis untuk belajar dan berproses menjadi manusia yang lebih bermanfaat untuk orang lain.
16. Teman teman LEADER 2017 terima kasih atas bantuannya selama proses perkuliahan di kampus ini.
17. Terima kasih untuk keluarga kecilku, adikku Nur Alqadri Nasda, Tante Nur Santi dan Muh. Kadafi yang selalu memberikan dukungan untuk penulis sehingga bisa kuat dan sampai dititik ini.
18. Terima kasih kepada Muhammad Reza Darmadi sosok yang begitu penting dalam hidup penulis. Terima kasih telah menemani penulis dari awal hingga saat ini. Terima kasih untuk selalu ada dalam kondisi apapun, yang selalu menguatkan disaat penulis merasa *down* dan selalu menjadi tempat yang nyaman untuk penulis. Terima kasih telah menjadi manusia terbaik di dunia ini. Penulis bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya memiliki sosok manusia hebat dalam hidup penulis. *I hope we will be together forever.*
19. Ika Sartika Ningsih, Megawati Albar, Ade Nurul Azizah, terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberikan bantuan disaat penulis membutuhkan. Terima kasih sudah hadir dalam hidup penulis.
20. Nismawati dan Mardatillah terima kasih telah menjadi teman yang begitu baik, memberikan banyak pelajaran hidup bagi penulis.
21. Terakhir, Terima kasih untuk diriku sendiri yang sangat hebat bisa berjuang dan bertahan sampai dititik ini. Maaf kalau selama ini aku sering merasa tidak percaya diri dengan apa adanya kamu dan sibuk mencari cara untuk menyempurnakan diri kamu yang sesungguhnya sudah sempurna. Dan maaf jika selalu memaksakanmu menyenangkan orang lain yang bukan tanggung jawabmu. Tanpa kamu semua ini tidak ada apa-apanya. Terima kasih diriku.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak dukungan serta doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.

Wasaalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 22 Juni 2022

Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	7
I.3 Tujuan Penelitian .....	7
I.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>8</b>
II.1 Konsep Manajemen .....	8
II.1.1 Definisi Manajemen.....	9
II.1.2 Fungsi Manajemen.....	12
II.1.3 Unsur Manajemen.....	14
II.1.4 Tingkatan Manajemen.....	16
II.1.5 Pendekatan Manajemen .....	17
II.2 Konsep Pengawasan.....	18
II.2.1 Pengertian Pengawasan.....	18

II.2.2 Tujuan Pengawasan .....	20
II.2.3 Prinsip Pengawasan .....	22
II.2.4 Tahap-Tahap Dalam Proses Pengawasan .....	24
II.2.5 Pengawasan Efektif .....	24
II.3 Konsep Pedagang Kaki Lima .....	27
II.3.1 Definisi Pedagang Kaki Lima .....	27
II.3.2 Ciri-ciri dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL).....	29
II.3 Penelitian Terdahulu.....	32
II.4 Kerangka Pikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
III.1 Pendekatan Penelitian.....	36
III.2 Tipe Penelitian .....	36
III.3 Unit Analisis .....	36
III.4 Informan.....	37
III.5 Sumber Data.....	37
III.6 Lokasi Penelitian.....	37
III.7 Teknik Pengumpulan Data .....	38
III.8 Teknik Analisis Data .....	39
III.9 Fokus Penelitian .....	39
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
IV.1 Gambaran Umum Kabupaten Bantaeng.....	40
IV.2 Letak Geografis.....	40
IV.3 Visi Misi Kabupaten Bantaeng.....	41
IV.4 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Bantaeng.....	42
IV.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.....	43
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>58</b>
V.1 Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantaeng.....	58

V.1.1 Penentuan Standar Pelaksanaan (Perencanaan).....	59
V.1.2 Penentuan Pengukuran Kegiatan.....	62
V.1.3 Pengambilan Tindakan Korektif.....	69
<b>BAB VI PENUTUP</b>	<b>72</b>
VI.1 Kesimpulan.....	72
VI.2 Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>77</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. Kerangka Pikir.....	34
Gambar IV.4 Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Bantaeng.....	42

## DAFTAR TABEL

Tabel V.1	Mekanisme Pelaksanaan Program Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantaeng.....	61
Tabel V.2	Waktu Pelaksanaan Pengawasan Pedagang Kaki Lima.....	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Dalam rangka otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan cenderung dimiliki oleh kabupaten/kota, harapan dan tuntutan masyarakat tentang keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, penegakan hukum dan penghargaan atas hak asasi manusia tidak bisa ditawar-tawar. Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, maka otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar, berdimensi jauh kedepan.

Untuk melaksanakan otonomi daerah diperlukan adanya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah, dari pemerintahan yang sentralisasi berubah menjadi pemerintahan yang desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab. Dengan adanya pemberian otonomi daerah diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Akan tetapi, dalam pelaksanaan otonomi daerah ini juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban daerah agar tercipta kondisi yang nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu alternatif mata pencaharian sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Usaha kecil dalam penjelasan UU No. 9 Tahun 1995 adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan



peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Tingginya kebutuhan hidup pada saat ini membuat masyarakat beralih profesi menjadi pedagang kecil-kecilan. Untuk menjadi PKL tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang melebihi sektor formal. Jenis usaha yang banyak diminati adalah makanan dan minuman serta berbagai kebutuhan pokok. Oleh sebab itu, banyak PKL yang memanfaatkan pinggir jalan sebagai lokasi usaha mereka.

Kehadiran PKL merupakan salah satu faktor yang menimbulkan persoalan. Beberapa masalah yang ditimbulkan oleh PKL diberbagai kota biasanya hampir sama, seperti masalah kemacetan, kebersihan serta keindahan kota. Ini disebabkan karena PKL terkadang cenderung berdagang di tempat yang tidak diizinkan untuk berdagang. Padahal kegiatan jual beli sudah difasilitasi oleh pemerintah dengan adanya kios atau lapak yang permanen dan telah memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan hak sebagai penyewa yang haknya telah dilindungi oleh undang-undang dan aman dari penggusuran.

Jenis dagangan yang biasa dijual oleh pedagang kaki lima ini ialah, makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk di dalamnya makanan mentah, seperti ikan, buah-buahan dan sayuran, kemudian masakan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauk dan minuman, adapula pedagang yang menjual barang bukan makanan seperti bensin (pertamini), pakaian, sandal, hingga masker, kemudian jasa, yang terdiri dari tukang jahit sepatu hingga tukang servis jam. Sedangkan

bentuk sarana perdagangan yang digunakan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan yaitu, gerobak/kereta dorong, yang biasanya digunakan oleh pedagang yang berjualan makanan atau minuman. Kemudian pikulan/keranjang, bentuk sarana ini digunakan oleh pedagang kaki lima atau semi permanen. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau berpindah tempat. Lalu warung semi permanen, yaitu berupa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan meja dan kursi. Dan gelaran/alas, pedagang menggunakan alas berupa tikar, kain atau sejenisnya untuk menjajakan dagangannya.

Mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu orang tenaga kerja. Keberadaan pedagang kaki lima itu sendiri merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif mendapatkan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang semakin sempit dan sulit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat yang membuka pekerjaan sebagai pedagang kaki lima. Semakin menjamurnya pedagang kaki lima di setiap daerah mengakibatkan kurangnya penataan pada lingkungan di kota, termasuk di Kabupaten Bantaeng ini.

Dengan adanya peraturan daerah mengenai larangan berjualan di atas trotoar, menjadi rujukan bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan pedagang kaki lima di Kabupaten Bantaeng. Pemerintah Kabupaten Bantaeng melakukan upaya tersebut yang bertujuan menciptakan tata kota yang bersih dan tertib karena Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha sektor informal dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Bantaeng, dengan dinas terkait yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan PKL yaitu Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng. Yang menaungi pelaku bidang usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki peranan

yang cukup besar dalam pengembangan ekonomi lokal khususnya Bantaeng, termasuk PKL, Satpol PP Kabupaten Bantaeng. Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksana tugas desentralisasi, dengan cara mengurus dan membina PKL untuk berjualan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, serta yang bertugas untuk menertibkan dan menata tempat usaha PKL.

Melakukan pengawasan pedagang kaki lima dengan merelokasi dari satu kawasan ke kawasan lain yang telah disediakan oleh pemerintah. Tindakan ini adalah sebuah wujud nyata yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bantaeng memberikan solusi alternatif kepada para pedagang kaki lima agar mau direlokasi ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Pedagang kaki lima yang dianggap sah, adalah pedagang kaki lima yang menempati lahan yang mendapat persetujuan dari “yang berwenang”. Maksud dari yang berwenang ini memiliki berbagai macam pengertian, mulai dari perorangan yang memiliki lahan, sampai tingkat pengurus RT, RW, Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Pemerintah Kota (Pemkot) Kabupaten Bantaeng. Dalam mengelola pedagang kaki lima diperlukan adanya pendekatan yang persuasif dan dialog langsung yang berkesinambungan agar diperoleh informasi yang berguna dalam proses pengawasan pedagang kaki lima.

Kabupaten Bantaeng merupakan kota kecil yang berjarak 120km dari Kota Makassar yang merupakan kota yang telah mengalami kemajuan dengan begitu pesat beberapa tahun belakangan ini. Dengan luas wilayah 395,83km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebesar 201.115 jiwa pada tahun 2019 lalu berdasarkan data BPS tahun 2020, data ini terus berubah seiring dinamika penduduk. Dengan

berkembangnya Kota Bantaeng membuat para pendatang dari luar masuk ke Kota Bantaeng baik untuk mencari pekerjaan maupun untuk menikmati kemajuan dari Kota Bantaeng.

Pedagang kaki lima (PK-5) sendiri memiliki banyak makna, menurut Purwadinata (2008:67) Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki).

Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kota. Kehadiran PKL mempunyai peranan dalam memberikan penghasilan yang relatif cukup bagi penduduk "marginal" maupun sebagai produsen barang-barang dan jasa yang diperlukan masyarakat kelas bawah. Namun, dibalik peranan dan fungsinya untuk menopang perekonomian rakyat kelas bawah tersebut, kehadiran sektor informal juga memunculkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang muncul yaitu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kemacetan, kesan kumuh, liar, serta merusak keindahan. Permasalahan lainnya yang terjadi yaitu, keberadaan para pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar untuk berjualan, yang dimana trotoar diperuntukkan bagi pengguna pejalan kaki, sedangkan pemerintah telah menyediakan lokasi untuk berjualan.

Dengan melihat berbagai permasalahan yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan kenyamanan kota yang disebabkan oleh pedagang kaki lima maka seharusnya ditangani bersama dengan cara melakukan pengawasan tanpa

“membunuh” sektor informal itu sendiri. Pemerintah Kota Bantaeng selama ini telah memberikan perhatian ekstra terhadap masalah PKL dengan menggelar operasi penataan yang dilakukan langsung oleh Satpol PP. Bahkan telah dilakukan pembangunan pasar sentral untuk ditempati para pedagang kaki lima. Namun hal tersebut tidak dapat memberikan efek jera bagi pedagang kaki lima dan mereka kerap kali bermain petak umpet dengan petugas pelaksana pengawasan dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam naungan pemerintah daerah. Dalam realitasnya kebijakan tentang pengaturan tempat usaha bagi pedagang kaki lima pada dasarnya telah ada pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Sehingga pemerintah Kabupaten Bantaeng mengeluarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, serta Peraturan Bupati Bantaeng No. 43 Tahun 2008 tentang pelarangan penyimpanan bahan bangunan di jalan dan bahu jalan. Sehingga pemerintah dapat melakukan pengawasan pedagang kaki lima di Kota Bantaeng sesuai dengan isi dari peraturan tersebut. Berbagai upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah pedagang kaki lima namun, terkadang penerapannya dilapangan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantaeng”**.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantaeng

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mendeksripsikan dan Menganalisis Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantaeng

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini, meliputi;

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan keilmuan dan pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai media informasi atau referensi khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik.

### **2. Secara Praktis**

Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang telah diperoleh peneliti selama mengikuti pendidikan di Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Hasanuddin hingga saat ini. Selain itu juga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk pembaca dan peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1 Konsep Manajemen**

Dalam mengemukakan model konsep manajemen antara ilmuwan yang satu dengan ilmu lainnya secara kenyataan belum terjadi keseragaman, karena manusia itu sendiri memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Karakteristik inilah yang menciptakan konsep manajemen dengan warna masing-masing, yang dimaksudkan di sini adalah karakteristik manusia, antara lain:

1. Keberadaan manusia dalam manajemen yang berkarakter pintar dan rajin merupakan suatu pencipta dorongan bagaimana aktivitas yang menjadi tanggung jawab manajemen dapat diselesaikan dengan baik, namun demikian bahwa penanganan manusia yang pintar dan rajin ini tidak mendapat kebebasan berpikir dan bertindak, atau dengan kata lain senantiasa yang dirasakan semacam penjajahan atau pemaksaan, akan manusia yang bersangkutan akan menjadi masa bodoh dan keadilan terhadap tugas dan tanggung jawabnya akan berkurang.
2. Manusia yang memiliki karakter dalam manajemen sebagai manusia yang pintar tetapi pemalas, perlakuannya dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud secara berdayaguna dan berhasilguna tentunya menggunakan pendekatan secara rasional dengan perilaku manusia sebagai penggerak manajemen menggambarkan dalam kondisi yang menyejukkan dan membahagiakan seluruh lapisan manusia dalam manajemen itu sendiri.

3. Keberadaan manusia dalam manajemen yang memiliki karakter sebagai manusia yang bodoh tetapi rajin. Manusia yang berkarakter seperti ini dituntut menjadi tanggung jawab oleh setiap manajer sehingga kebodohan dapat diminimalisasi untuk lebih dapat menjadi berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas aktivitas manajemen yang akan maupun sedang dilaksanakan menjadikan manajemen semakin kuat.
4. Karakter manusia yang paling tidak menguntungkan dalam manajemen adalah karakter manusia yang pemalas dan bodoh. Karakter manusia seperti ini merupakan beban seorang manajer dalam mengembangkan keberhasilannya. Manusia yang berkarakter pemalas dan bodoh ini memerlukan kreativitas dan keseriusan memberikan pembinaan untuk mengarahkan, sehingga kemalasan dan kebodohan ini dapat dikurangi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara berdayaguna dan berhasilguna pada semua manusia.

### **II.1.1 Definisi Manajemen**

Secara etimologi, *management* (di Indonesia diterjemahkan sebagai “manajemen”) berasal dari kata *manus* (tangan) dan *agere* (melakukan), yang setelah digabung menjadi kata *manage* (bahasa Inggris) berarti mengurus atau *managiere* (bahasa Latin) yang berarti melatih.

Pengertian manajemen menurut *Federick W. Taylor* yaitu;

*“The art of management, is defined as knowing exactly what you want to do, and then seeing that they do it in the best and cheapest way.”*



Maksudnya, manajemen itu dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan anda kerjakan, selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah atau tidak.

*Oliver Sheldon*, menjelaskan manajemen sebagai berikut:

*“Management proper is the function in industry concerned in the execution of policy, with in the limits set by administration, in the employment of the organization for the particular objects set before it”.*

Maksudnya, kegunaan manajemen adalah sebagai fungsi kajian industri dalam pelaksanaan kebijakan, dipandang dalam batas-batas kumpulan penyelenggaraan, dalam pekerjaan organisasi untuk tujuan khusus yang akan datang.

*George Terry*, menjelaskan manajemen sebagai berikut:

*“Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objective by the use of human being and other resources”.*

Maksudnya, manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya.

Adapun menurut *Ordway Tead*, mengemukakan manajemen yaitu:

*“Management is the process and agency which direct and guides the operations of an organization in the realizing of established aims”.*

Maksudnya, manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ralph Davis, mengemukakan pendapatnya mengenai manajemen adalah sebagai berikut:

*“Management is the function of the executive leadership anywhere”.*

Maksudnya, manajemen adalah fungsi dari setiap pimpinan pemerintahan di mana pun berada.

Menurut Follet, Mary Parker (1997) dalam buku Ernie Tisnawati mengatakan manajemen adalah sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. (Dia mengartikan manajemen yang menitikberatkan pada seninya, dimana praktik atau implementasi membuat sistem yang baik dan benar).

Menurut Sikula, Andrew E (2011), menguraikan manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.

Selanjutnya Siagian, Sondang P. (2002), menjelaskan bahwa manajemen adalah:

*“Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Definisi ini menekankan suatu keahlian yang harus dimiliki”.*

Menurut Robbins, Stephen P. (2005), mendefinisikan manajemen adalah suatu proses melakukan koordinasi dan integrasi kegiatan-kegiatan kerja agar disesuaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain (pengertian ini menekankan pada efisien dan efektif).

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang terdiri dari perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam menjalankan fungsi bersama untuk mencapai suatu tujuan.

### **II.1.2 Fungsi Manajemen**

Bedasarkan fungsi manajemen secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Adapun menurut *George R Terry* (1958) yang menyatakan bahwa fungsi manajemen ada 4 atau biasa dikenal dengan istilah POAC, diantaranya adalah:

1. *Planning* (perencanaan), ialah menetapkan aktifitas yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang direncanakan.
2. *Organizing* (pengorganisasian), yaitu pembagian tugas kepada para anggota yang terlibat dalam pencapaian tujuan dalam suatu kelompok.
3. *Actuating* (pengarahan), yaitu adanya manajemen untuk mendorong anggota agar selalu berusaha keras untuk mencapai tujuan dalam suatu kelompok.
4. *Controlling* (pengawasan), yaitu pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan diperbaiki agar tujuan dapat tercapai dengan baik.

Adapun fungsi manajemen menurut ahli lainnya yaitu, menurut Sondang P. Siagian dalam Hasibuan, fungsi-fungsi manajemen terdiri dari:

1. Perencanaan (*planning*) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pengorganisasian (*organizing*) adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*motivating*) dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan proses pemberian dorongan kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan efektif.
4. Pengawasan (*controlling*) adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
5. Penilaian (*evaluation*) adalah fungsi organic administrasi dan manajemen yang terakhir. Definisinya ialah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Selanjutnya, fungsi manajemen menurut Henri Fayol (2010), yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengendalian.

1. Perencanaan, dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah startegis guna mencapai tujuan tersebut.
2. Pengorganisasian, merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana.
3. Pengarahan, merupakan proses untuk menumbuhkan semangat (*motivation*) pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat, serta membimbing para karyawan dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.
4. Pengendalian, yaitu untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya. Fungsi pengendalian mencakup empat kegiatan yaitu; (1) menentukan standar prestasi; (2) mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini; (3) membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi; dan (4) melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan.

### **II.1.3 Unsur Manajemen**

Manajemen merupakan sebuah subjek yang sangat penting. Manajemen tidak saja mengidentifikasi, menganalisis dan mengkombinasikan secara efektif bakat orang-orang dan mendayagunakan sumber-sumber tersebut dinyatakan enam M dari manajemen, yaitu:

1. *Man*, tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja eksekutif maupun tenaga kerja kooperatif;
2. *Money*, uang atau modal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. *Methods*, cara-cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan;
4. *Materials*, bahan-bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan;
5. *Machines*, mesin atau alat yang digunakan dalam mencapai tujuan;
6. *Market*, pasar untuk menjual barang dan jasa yang dihasilkan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas mengenai fungsi manajemen, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa fungsi manajemen meliputi, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dalam keempat fungsi manajemen tersebut, peneliti akan fokus pada satu indikaor yaitu fungsi pengawasan.

Menurut Situmorang, 1998: 22 maksud dari pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang direncanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga diadakan perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.

4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sangat penting dalam suatu kegiatan agar dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik.

Dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat diperlukan adanya pengawasan agar perencanaan yang telah dibuat sebelumnya dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia mempunyai sifat salah dan khilaf. Menurut Husnaini (2001:400), tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
2. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.

#### **II.1.4 Tingkatan Manajemen**

Dalam sebuah perusahaan atau organisasi bisnis, organisasi sosial maupun organisasi pemerintah yang memegang peran adalah manajer, dimana dalam manajemen dikenal ada tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Top Manager* (manajemen puncak), dikenal pula dengan istilah *executive officer*, bertugas merencanakan kegiatan dan startegi perusahaan atau

organisasi secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan atau organisasi agar berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

- b. *Midle Manager* (manajemen menengah), mencakup semua manajemen yang berada diantara manajer lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya.
- c. *First Line Manager* (manajemen lini pertama), dikenal dengan istilah manajemen operasional, merupakan manajemen tingkatan paling bawah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan nonmanajerial yang terlibat dalam proses produksi.

#### **II.1.5 Pendekatan Manajemen**

Pengetahuan tentang pendekatan utama sangat membantu dalam studi manajemen dan dalam menetapkan pengembangan serta manfaatnya. Ada lima pendekatan utama, yakni:

1. Pendekatan menurut proses atau operasional, pendekatan ini memusatkan pada fungsi-fungsi dasar manajemen.
2. Pendekatan menurut tingkah laku manusianya, pendekatan ini memusatkan pada tingkah laku manusia, pendekatan tersebut membawa manajemen pada metode dan konsep-konsep pengetahuan sosial yang relevan terutama psikologi dan antropologi.
3. Pendekatan dari sistem sosial, yaitu pendekatan yang berorientasi secara sosiologis, berurusan dengan berbagai kelompok dan hubungan-hubungannya serta berusaha menyatukan kelompok-kelompok ini kedalam suatu sistem sosial.



4. Pendekatan dari sistem (*system approach*). Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bereaksi. Pendekatan sistem ini bertujuan untuk mengembangkan suatu kerangka sistematis untuk menguraikan hubungan-hubungan antar aktivitas. Pendekatan ini memberikan suatu alat untuk melihat dengan jelas faktor-faktor yang bersifat tidak tetap, hambatan, dan interaksi.
5. Pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan model matematika dan proses hubungan dan data yang dapat diukur. Pendekatan ini harus didefinisikan dengan tepat segala tujuan persoalan dan hubungan dengan cara yang dapat diukur.

## **II.2 Konsep Pengawasan**

### **II.2.1 Pengertian Pengawasan**

Pengawasan merupakan salah satu dari empat fungsi manajemen dan berada pada urutan paling akhir dari fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry, yaitu *planning, organizing, actuating, controlling*, atau biasa disingkat POAC.

Adapun pengawasan menurut George R. Terry adalah pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yang selaras dengan standar.

Menurut M. Manulang (2002:173) berpendapat bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah

dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Selanjutnya, Henri Fayol dalam Sumantri.S (2006:1) mengatakan pengawasan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengusahakan agar usaha sesuai dengan rencana yang berarti pengukuran dan koreksi pelaksanaan kerja oleh bawahan untuk melaksanakan rencana.

Winardi (2003:379) mengatakan pengawasan merupakan mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya adalah mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menetapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Sedangkan Sondang P. Siagian mendefinisikan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa pengertian pengawasan menurut para ahli maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan sendiri merupakan elemen yang sangat penting dilakukan karena salah satu penentu yang dapat dilihat apakah perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak. Dengan dilakukannya pengawasan maka dapat diketahui jika adanya penyimpangan, penyelewangan dan lain sebagainya dalam proses pelaksanaan kegiatan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Dalam kegiatan pengawasan ini secara keseluruhan merupakan suatu kegiatan yang membandingkan yang sedang dikerjakan atau sudah dikerjakan dengan berpatokan pada perencanaan yang dilakukan sebelumnya.

## II.2.2 Tujuan Pengawasan

Kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya memerlukan pengawasan agar perencanaan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan merupakan elemen yang sangat penting karena pada dasarnya manusia sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah. Oleh karena itu, dalam organisasi perlu adanya pengawasan dengan tujuan untuk memimbing dan agar kedepannya menjadi lebih baik serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya.

Hasibuan (2014), mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah : 1) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, 2) Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan, 3) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.

Sedangkan menurut Husnaini (2001:400), mengemukakan tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, dan hambatan.
- b. Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, pemborosan, dan hambatan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas mengenai tujuan pengawasan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan atau kebijakan.

Adapun pendapat lain mengenai tujuan pengawasan yaitu dikemukakan oleh Griffin, sebagai berikut:

- a. Beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Organisasi akan menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnis yang tidak stabil dan bergejolak. Dalam rentang waktu antara penetapan tujuan dan pencapaian tujuan, banyak kejadian dalam organisasi dan lingkungannya yang dapat menuntun pergerakan kearah tujuan atau penyimpangan itu sendiri. Sistem pengawasan yang baik dapat membantu para atasan mangantisipasi, memantau dan merespon perubahan yang terjadi dalam organisasi.
- b. Membatasai akumulasi kesalahan. Kesalahan-kesalahan kecil pada umumnya tidak mneimbulkan kerusakan serius pada kinerja dalam organisasi. Namun dari waktu ke waktu, kesalahan-kesalahan dapat terakumulasi dan akan berdampak serius. Oleh karena itu pengawasan diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan kecil yang dapat berulang-ulang terjadi. Dengan adanya pengawasan, atasan dapat melihat penyebab terjadinya kesalahan dan dapat mengambil keputusan untuk bekerja lebih cermat kedepannya.
- c. Mengatasi kompleksitas organisasi. Perusahaan jika hanya menggunakan satu jenis bahan baku atau sumber daya, membuat satu jenis produk atau jasa, memiliki desain organisasi yang sederhana, dan mengalami permintaan produk yang konstan, maka para manajernya dapat membuat sistem pengawasan yang minim dan sederhana. Tetapi apabila perusahaan yang memproduksi produk dan jasa dengan memakai beragam bahan baku dan sumber daya dan memiliki area pasar yang luas, desai organisasi yang rumit, serta memiliki banyak pesaing maka

memerlukan sistem yang canggih untuk membuat pengawasan yang memadai.

- d. Meminimalisasi biaya. Pengawasan juga dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan output apabila dipraktekkan secara efektif. Secara filosofis dikatakan bahwa pengawasan sangat penting karena manusia pada dasarnya mempunyai sifat salah, sehingga dalam organisasi dibutuhkan adanya pengawasan untuk mendidik dan menjadi lebih baik kedepannya.

Berdasarkan pendapat diatas maka peneliti dapat menyederhanakan bahwa tujuan pengawasan dapat tercapai jika fungsi pengawasan dilakukan dengan efektif sebelum terjadinya penyimpangan-penyimpangan sehingga sebelumnya dapat lebih tercegah, dibandingkan dengan tindakan pengawasan yang dilakukan setelah adanya kejadian penyimpangan dalam organisasi.

### **II.2.3 Prinsip Pengawasan**

Untuk tercapainya fungsi pengawasan sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka pimpinan organisasi yang melaksanakan fungsi pengawasan ini harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan. Adapun prinsip-prinsip pengawasan menurut Soewarno Handyaningrat (1996:149) sebagai berikut:

- a. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
- b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri.
- c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan.

- d. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna penelitian.

Kemudian terdapat pula prinsip-prinsip pengawasan yang dikemukakan oleh Ulbert Silalahi dalam bukunya *Studi Ilmu Administrasi Negara* (2002:178), prinsip-prinsip pengawasan tersebut sebagai berikut:

- a. Pengawasan harus berlangsung terus menerus bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan.
- b. Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang pelaksanaan pekerja secara objektif.
- c. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi juga mencari atau menemukan kelemahan dalam melaksanakan pekerjaan.
- d. Pengawasan harus memberi bimbingan dan mengarahkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam pencapaian tujuan.
- e. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus menciptakan efisiensi (hasil guna).
- f. Pengawasan harus fleksibel, pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (*plan and objective oriented*).
- g. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau kegiatan-kegiatan yang sangat menentukan atau *control by exception*.
- h. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*).

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai prinsip-prinsip pengawasan maka pengawasan akan lebih berorientasi, berdayaguna dan berkesinambungan, karena pada dasarnya prinsip yang baik merupakan kunci keberhasilan tercapainya suatu tujuan pengawasan.

#### **II.2.4 Tahap-Tahap Dalam Proses Pengawasan**

Dalam melakukan pengawasan terdapat beberapa tahap-tahap yang harus dilakukan agar pengawasan tersebut berjalan dengan efektif. Adapun tahap-tahap dalam proses pengawasan menurut Handoko Hani (2013), diantaranya adalah:

- a. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan). Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pengawasan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.
- b. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pengamatan (observasi), laporan-laporan baik tertulis maupun lisan. Metode-metode otomatis dan inspeksi, pengujian (test) atau dengan pengambilan sampel.
- c. Pengambilan Tindakan Korektif. Pada tahap ini dilakukan untuk mencari jalan keluar dalam mengambil Tindakan korelasi terhadap penyimpangan yang terjadi.

#### **II.2.5 Pengawasan Efektif**

Pelaksanaan pengawasan yang efektif merepukan salah satu refleksi dari efektifitas manajerial seorang pemimpin. Sistem pengawasan yang dilakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan harus berlajan dengan efektif, agar tujuan dari kegiatan pengawasan dapat tercapai. Kriteria-kriteria pengawasan yang efektif dikemukakan oleh T.Hani Handoko (1995 : 373-374) antara lain:

1. Akurat

Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang tidak tepat atau keliru atau bahkan akan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada sebelumnya.

2. Tepat waktu

Informasi dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan secepat mungkin.

3. Obyektif

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.

4. Terpusat pada titik pengawasan strategik

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan menyebabkan kerusakan fatal.

5. Realistik secara ekonomis

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

6. Realistik secara organisasional

Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi karena setiap tahap proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses dan



kegagalan keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang membutuhkan.

8. Fleksibel

Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.

9. Bersifat sebagai petunjuk atau operasional

Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan kesalahan tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.

10. Diterima para anggota organisasi

Pengawasan dapat menunjukkan letak kesalahan dan penyimpangan dari pegawai-pegawainya, sehingga dapat diterima dan dimengerti oleh anggotanya.

Sedangkan pengawasan efektif menurut M. Simbolon (2004 : 70) mengungkapkan syarat-syarat pengawasan efektif diantaranya adalah:

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana dan kedudukan seseorang.
2. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu pimpinan dan pribadinya.
3. Pengawasan harus menunjukkan penyimpangan-penyimpangan pada hal-hal yang penting.
4. Pengawasan harus obyektif.
5. Pengawasan harus fleksibel.
6. Pengawasan harus hemat.
7. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan.

## **II.3 Konsep Pedagang Kaki Lima**

### **II.3.1 Definisi Pedagang Kaki Lima**

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini Pedagang kaki lima (PK-5) sendiri memiliki banyak makna, ada yang mengatakan Pk-5 berasal dari orang yang berjualan dengan menggelar barang dagangannya dengan bangku atau meja yang berkaki empat kemudian jika ditambah dengan sepasang kaki pedagangnya maka menjadi berkaki lima sehingga timbul-lah julukan pedagang kaki lima. Tak hanya itu saja, ada juga yang memaknai Pk-5 sebagai pedagang yang menggelar barang dagangannya di tepi jalan yang lebarnya lima kaki dari trotoar atau tepi jalan. Ada pula yang memaknai Pk-5 dengan orang yang melakukan kegiatan usaha berdagang dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dan dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan yang terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat keramaian. Istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah

pedagang emperan jalan, sekarang berubah menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika menurut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang kaki lima.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat(1) dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan swasta yang bersifat sementara.

Menurut Nugroho (2013:159) Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Menurut Damsar (2002:51) Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat-tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalanan umum, dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan saran atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum.

Menurut McGee dan Yeung (1997:66), PKL mempunyai pengertian yang sama dengan *'hawkers'*, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual ditempat umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Senada dengan hal itu, Soedjana (1981) dalam kutipan Hilal (2013), mendefinisikan PKL sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang

dan jasa untuk dijual di atas trotoar atau di tepi/di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan/pertokoan, pasar, pusat rekreasi/hiburan, pusat perkantoran dan pusat Pendidikan, baik secara menetap atau setengah menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari.

Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Winardi dalam Haryono, 1989).

Pedagang kaki lima pada umumnya adalah self-employed, artinya mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi, biasanya berasal dari sumber dana ilegal atau dari supplier yang memasok barang dagangan. Ini berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya, dikarenakan rendahnya tingkat keuntungan dan cara pengelolaan uang. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil (Hidayat, 1978).

### **II.3.2 Ciri-ciri dan Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Menurut Susanto (2006:25) salah seorang pengamat dari Fakultas Hukum Unpar dalam hasil penelitiannya yang berjudul "Masalah Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Bandung dan penertibannya melalui operasi TIBUM 1980", menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima ialah orang

(pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak. Istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya lima kaki. Tempat ini umumnya terletak di trotoar, depan toko dan tepi jalan.

Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima adalah:

1. Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik.
2. Tidak memiliki surat izin usaha.
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
4. Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat dimana banyak orang ramai.
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.

PKL memiliki karakteristik pribadi wirausaha, antara lain mampu mencari dan menangkap peluang usaha, memiliki keuletan, percaya diri dan kreatif, serta inovatif. PKL mempunyai potensi yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebagai berikut:

1. PKL tidak dapat dipisahkan dari unsur budaya dan eksistensinya tidak dapat dihapuskan.
2. PKL dapat dipakai sebagai penghias kota apabila ditata dengan baik.
3. PKL menyimpan potensi pariwisata.
4. PKL dapat menjadi pembentuk estetika kota bila di desain dengan baik.

Karakteristik aktivitas PKL dapat ditinjau baik dari sarana fisik dalam ruang perkotaan. Karakteristik dari PKL dijabarkan oleh Simanjuntak (2009:44) sebagai berikut:

1. Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
2. Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil.
3. Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha.

Pedagang kaki lima sendiri memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian diantaranya:

1. Dapat menyebarluaskan hasil produksi tertentu
2. Mempercepat proses kegiatan produksi karena barang dijual cepat laku
3. Membantu ekonomi masyarakat lemah dalam pemenuhan kebutuhan dengan harga yang relatif murah
4. Mengurangi tingkat pengangguran.

Namun, dibalik peranan yang cukup penting dalam perekonomian, terdapat pula berbagai kelemahan yang ditimbulkan oleh para pedagang kaki lima ini diantaranya:

1. Pedagang kaki lima dapat menimbulkan terganggunya kondisi lalu lintas
2. Mengurangi keindahan dan kebersihan kota
3. Mendorong tingginya tingkat urbanisasi
4. Membuat tata ruang kota menjadi kacau

#### II.4 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti mengangkat berbagai penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian peneliti. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asti Ayeti Syafardi Tahun 2012 Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara, dalam penelitiannya yang berjudul “Penata Kelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Buah Kota Padang”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Edward III yang indikatornya adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, subjek penelitian ditentukan dengan cara purposive. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKL menghambat lalu lintas, merusak keindahan kota, membuat lingkungan menjadi kotor serta terkesan terlihat kumuh. Sehingga, perlu adanya kebijakan sendiri mengenai penataan PKL di kota Padang itu sendiri, relokasi pasar juga belum terealisasikan dengan baik sehingga tatanan PKL belum maksimal.
2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irinovita Sari Tahun 2019 Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, dalam penelitiannya yang berjudul “Tata Kelola Pedagang Kaki *Limata* di Kota Makassar”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Warsono tentang empat prinsip

tata kelola pemerintahan yang indikatornya adalah keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, dan tanggapan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKL dapat menghambat lalu lintas, keindahan kota dll. Dalam pengelolaan PKL juga diperlukannya transparansi dari pemerintah agar memudahkan dalam pengelolaan PKL.

## **II.5 Kerangka Pikir**

Dalam penelitian ini kerangka pikir yang digunakan peneliti menjelaskan bagaimana teori tahap-tahap pengawasan yang dikemukakan oleh Hani Handoko (2013) dalam bukunya Manajemen (edisi 2) digunakan sebagai konsep bagaimana Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantaeng. Teori tersebut digunakan penulis karna dalam penelitian yang nantinya akan dilakukan diduga kuat masih terjadi pelanggaran oleh para pedagang kaki lima, karena belum berfungsinya pengawasan yang efektif dalam pengawasan pedagang kaki lima sebagaimana mestinya. Sehingga teori ini bisa dijadikan landasan peneliti dalam melakukan penelitian.

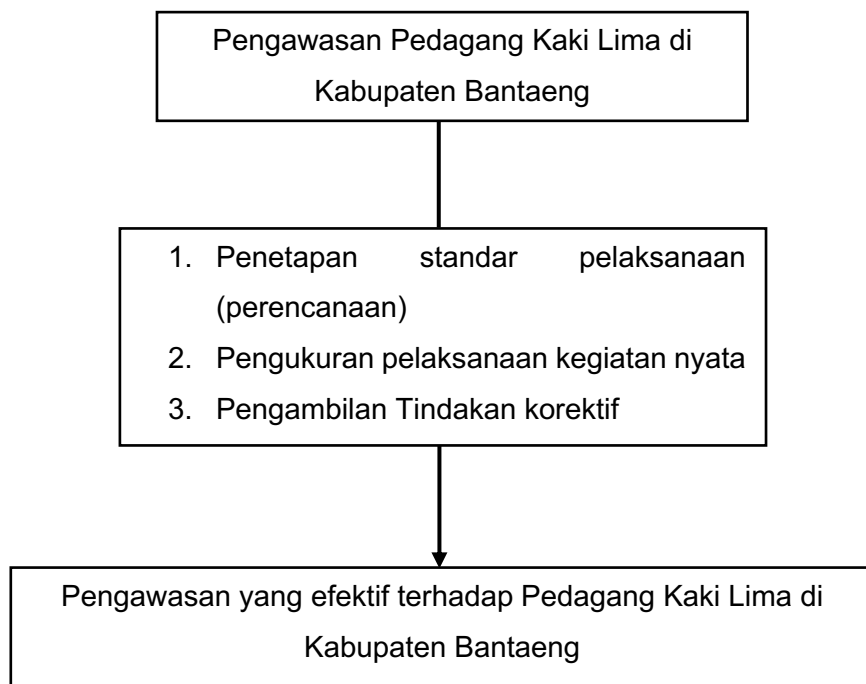
Dalam penelitian ini untuk mengukur Pengawasan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Bantaeng maka, peneliti menggunakan Teori Tahap-Tahap Pengawasan yang dikemukakan oleh Hani Handoko, yang dimana terdiri dari:

- a. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan). Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pengawasan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.



- b. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu pengamatan (observasi), laporan-laporan baik tertulis maupun lisan. Metode-metode otomatis dan inspeksi, pengujian (test) atau dengan pengambilan sampel.
- c. Pengambilan Tindakan Korektif. Pada tahap ini dilakukan untuk mencari jalan keluar dalam mengambil Tindakan korelasi terhadap penyimpangan yang terjadi.

Kerangka penelitian tersebut dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

Kerangka pikir ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pedagang kaki lima di Kabupaten Bantaeng telah berjalan

dengan baik atau tidak yang sesuai dengan syarat efektifitas pengawasan. Dan bagaimana para pedagang kaki lima dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga terlaksananya pengawasan yang efektif terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Bantaeng.